SALINAN



BUPATI PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 95 TAHUN 2022 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa dengan adanya penyesuaian nomenklatur jabatan pelaksana pada Perangkat Daerah berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 95 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 80 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 95 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Ruang Kabupaten, Pekalongan Penataan disesuaikan dan diubah untuk ketiga kali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 95 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Kabupaten dalam Pembentukan Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara 1950 Tahun Nomor Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);

- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4
 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
 Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan
 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016
 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
 Pekalongan Nomor 56), sebagaimana telah diubah
 beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
 Kabupaten Pekalongan Nomor 12 Tahun 2023 tentang
 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
 Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan
 dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan
 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023
 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
 Pekalongan Nomor 114);
- 10. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 47);
- 11. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 Nomor 8);
- 12. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 95 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 Nomor 95), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 80 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 95 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 81):

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 95 TAHUN 2022 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PEKALONGAN.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 95 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 Nomor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 80 Tahun 2023 Peraturan Perubahan Kedua Atas tentang Pekalongan Nomor 95 Tahun 2022 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 81), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada mulai diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati pengundangan ini menempatkannya dalam Berita Daerah.

> Ditetapkan di Kajen pada tanggal 20 Juni 2024

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajen pada tanggal 20 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

TTD

M. YULIAN AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2024 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

ADITOMO HERLAMBANG, S.H. Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19680517 198903 1 009

PETA JABATAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN PEKALONGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

			·	alassias a Harris Dan R									v		_
		Kepala D	inas Pe	ekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kelas 14									Kelas Jabatan Kelas 14	B 1	
													Kelas 13 Kelas 12	0	_
													Kelas 11	4	
													Kelas 10 Kelas 9	8	_
													Kelas 8	15	Ξ
													Kelas 7 Kelas 6	34 27	
													Kelas 5 Kelas 3	119 4	3
	Kelompok Jabatan Fu		\Box					Sekretaris Dina	ıs				Kelas 1	6	_
	NAMA JABATAN Analis Kebijakan Ahli Madya	KL B K S 12 0 1 -1	_					Kelas 12					Jumlah	227	_ 5
	Pembina Jasa Konstruksi Ahli Madya	12 0 2 -2	- 1												
	Perencana Ahli Madya	12 0 1 -1												,	
	Pengelola Sumber Daya Air Ahli Madya	12 0 1 -1	<u> </u>												
	Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahl Madya	12 0 2 -2	<u>.</u>	Kepala Subbagian Perencanaa	an			Kepala Subbagian Ke	uanga	n			Kepala Subbagian Umum	dan Ke	pe
	Penata Kelola Bangunan Gedung dar Kawasan Permukiman Ahli Madya	12 0 2 -2		Kelas 9				Kelas 9					Kelas 9		
	Penata Kelola Penyehatan Lingkungar Ahli Madya	12 0 1 -1		NAMA JABATAN KL	В	K	s	NAMA JABATAN	KL	В	К	s	NAMA JABATAN	KL	
	Penata Ruang Ahli Madya	11 0 1 -1	<u></u>	Perencana Ahli Pertama 8	_		-1	Penelaah Teknis Kebijakan	7	6	7	-1	Arsiparis Penyelia	8	_
				Penelaah Teknis Kebijakan 7	_		0	Pengelola Layanan Operasional	6	2	2	0	Arsiparis Mahir	7	_
				Pengadministrasi Perkantoran 5	2	2	0						Arsiparis Terampil Pranata Komputer Penyelia	6 8	
													Pranata Komputer Mahir	7	
													Pranata Komputer Terampil	6	
													Penelaah Teknis Kebijakan	7	_
													Pengolah Data dan Informasi	6	_
													Pengadministrasi Perkantoran Operator Layanan Operasional	5 3	_
				NAMA JABATAN KL	В	K	S						Operator Layanan Operasional	1	_
				Perencana Ahli Muda 10	_	1	-1								
				_											
		1							l						
Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air	Kepala Bidang Cipta	Karya		Kepala Bidang Bina Marga				Kepala Bidang Tata Ruang d	an Per	tanaha	an				
Kelas 11	Kelas 11		1	Kelas 11	В	K	S	Kelas 11				S			
		Karya	- 1		_	_	S -1			tanaha B	K 1	S 0			
	Kelas 11 NAMA JABATAN	KL B K S		NAMA JABATAN KL Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli	_	2		Kelas 11 NAMA JABATAN	KL	В	K				
Kelas 11	Kelas 11 NAMA JABATAN Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda	KL B K S 10 2 2 0 8 2 2 0		Kelas 11 NAMA JABATAN KL Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Q	1	1	-1	Kelas 11 NAMA JABATAN Analis Kebijakan Ahli Muda	KL 10	B 1	1	0			
Kelas 11	Kelas 11 NAMA JABATAN Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama Penata Kelola Penyehatan Lingkungar	KL B K S 10 2 2 0 8 2 2 0		Kelas 11 NAMA JABATAN KL Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama 8	1 1 5	1 7	-1 0	Kelas 11 NAMA JABATAN Analis Kebijakan Ahli Muda Analis Kebijakan Ahli Pertama	KL 10	B 1 0	1 1	-1			
Kelas 11 NAMA JABATAN KL B K S Pengelola Sumber Daya Air Ahli 10 2 3 -1 Muda Pengelola Sumber Daya Air Ahli 8 0 8 -8 Pengamat Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	Kelas 11 NAMA JABATAN Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama Penata Kelola Penyehatan Lingkungar Ahli Muda Penata Kelola Penyehatan Lingkungar	KL B K S 10 2 2 0 8 2 2 0 10 1 2 -1 8 1 4 -3		NAMA JABATAN KL Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama Penelaah Teknis Kebijakan 7	1 5 1	2 1 7 1	-1 0 -2	Kelas 11 NAMA JABATAN Analis Kebijakan Ahli Muda Analis Kebijakan Ahli Pertama Penata Ruang Ahli Muda	KL 10 8	B 1 0 1	1 1 3	-1 -2			
Kelas 11 NAMA JABATAN KL B K S	Kelas 11 NAMA JABATAN Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama Penata Kelola Penyehatan Lingkungar Ahli Muda Penata Kelola Penyehatan Lingkungar Ahli Pertama	KL B K S 10 2 2 0 8 2 2 0 10 1 2 -1 8 1 4 -3 10 1 3 -2	3	Kelas 11 NAMA JABATAN KL Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama Penelaah Teknis Kebijakan 7 Pengelola Layanan Operasional 6	1 5 1	2 1 7 1 3	-1 0 -2 0	Kelas 11 NAMA JABATAN Analis Kebijakan Ahli Muda Analis Kebijakan Ahli Pertama Penata Ruang Ahli Muda Penata Ruang Ahli Pertama	KL 10 8 9 8	B 1 0 1 3	1 1 3 5	0 -1 -2 -2			
Kelas 11	Kelas 11 NAMA JABATAN Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama Penata Kelola Penyehatan Lingkungar Ahli Muda Penata Kelola Penyehatan Lingkungar Ahli Pertama Penata Kelola Bangunan Gedung dar Kawasan Permukiman Ahli Muda Penata Kelola Bangunan Gedung dar	KL B K S 10 2 2 0 8 2 2 0 10 1 2 -1 8 1 4 -3 10 1 3 -2	3	Kelas 11 NAMA JABATAN KL Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama Penelaah Teknis Kebijakan 7 Pengelola Layanan Operasional 6 Operator Layanan Operasional 5	1 5 1 1	2 1 7 1 3	-1 0 -2 0 -2	Kelas 11 NAMA JABATAN Analis Kebijakan Ahli Muda Analis Kebijakan Ahli Pertama Penata Ruang Ahli Muda Penata Ruang Ahli Pertama Penelaah Teknis Kebijakan	KL 10 8 9 8 7	B 1 0 1 3 5	1 1 3 5	0 -1 -2 -2 0			
Kelas 11 NAMA JABATAN KL B K S	Kelas 11 NAMA JABATAN Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama Penata Kelola Penyehatan Lingkungar Ahli Muda Penata Kelola Penyehatan Lingkungar Ahli Pertama Penata Kelola Bangunan Gedung dar Kawasan Permukiman Ahli Muda Penata Kelola Bangunan Gedung dar Kawasan Permukiman Ahli Pertama	KL B K S 10 2 2 0 0 8 2 2 0 0 10 1 2 -1 10 1 3 -2 10 10 10 10 10 10 10 1	3	Kelas 11 NAMA JABATAN KL Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama Penelaah Teknis Kebijakan 7 Pengelola Layanan Operasional 6 Operator Layanan Operasional 5 Penilik Jalan 5	1 5 1 1 1	2 1 7 1 3 1 1 1	-1 0 -2 0 -2 0	Kelas 11 NAMA JABATAN Analis Kebijakan Ahli Muda Analis Kebijakan Ahli Pertama Penata Ruang Ahli Muda Penata Ruang Ahli Pertama Penelaah Teknis Kebijakan Pengolah Data dan Informasi Penata Laksana Agraria dan Tata	8 9 8 7 6	B 1 0 1 3 5 0	1 1 3 5	0 -1 -2 -2 0			
NAMA JABATAN KL B K S	Kelas 11 NAMA JABATAN Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama Penata Kelola Penyehatan Lingkungar Ahli Muda Penata Kelola Penyehatan Lingkungar Ahli Pertama Penata Kelola Bangunan Gedung dar Kawasan Permukiman Ahli Muda Penata Kelola Bangunan Gedung dar Kawasan Permukiman Ahli Pertama Penata Kelola Bangunan Gedung dar Kawasan Permukiman Ahli Pertama	KL B K S 10 2 2 0 8 2 2 0 10 1 2 -1 8 1 4 -3 10 1 3 -2 8 1 4 -3 7 3 3 0 7 0 6 -6 6 1 2 -1	;	NAMA JABATAN KL Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama Penelaah Teknis Kebijakan 7 Pengelola Layanan Operasional 6 Operator Layanan Operasional 5 Penilik Jalan 5 Pengadministrasi Perkantoran 5	1 5 1 1 1	2 1 7 1 3	-1 0 -2 0 -2 0	Kelas 11 NAMA JABATAN Analis Kebijakan Ahli Muda Analis Kebijakan Ahli Pertama Penata Ruang Ahli Muda Penata Ruang Ahli Pertama Penelaah Teknis Kebijakan Pengolah Data dan Informasi Penata Laksana Agraria dan Tata Ruang	KL 10 8 9 8 7 6 6	B 1 0 1 3 5 0 0 0	K 1 1 3 5 5 1 1 1	0 -1 -2 -2 -2 0 -1			
NAMA JABATAN KL B K S	Kelas 11 NAMA JABATAN Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama Penata Kelola Penyehatan Lingkungar Ahli Muda Penata Kelola Penyehatan Lingkungar Ahli Pertama Penata Kelola Bangunan Gedung dar Kawasan Permukiman Ahli Muda Penata Kelola Bangunan Gedung dar Kawasan Permukiman Ahli Pertama Penetah Kelola Bangunan Gedung dar Kawasan Permukiman Ahli Pertama Penetah Teknis Kebijakan Penata Layanan Operasional	KL B K S 10 2 2 0 8 2 2 0 10 1 2 -1 8 1 4 -3 10 1 3 -2 8 1 4 -3 7 3 3 0 7 0 6 -6 -6	;	NAMA JABATAN KL Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama Penelaah Teknis Kebijakan 7 Pengelola Layanan Operasional 6 Operator Layanan Operasional 5 Penilik Jalan 5 Pengadministrasi Perkantoran 5	1 5 1 1 1	2 1 7 1 3	-1 0 -2 0 -2 0	Kelas 11 NAMA JABATAN Analis Kebijakan Ahli Muda Analis Kebijakan Ahli Pertama Penata Ruang Ahli Muda Penata Ruang Ahli Pertama Penelaah Teknis Kebijakan Pengolah Data dan Informasi Penata Laksana Agraria dan Tata Ruang	KL 10 8 9 8 7 6 6	B 1 0 1 3 5 0 0 0	K 1 1 3 5 5 1 1 1	0 -1 -2 -2 -2 0 -1			
NAMA JABATAN KL B K S	Kelas 11 NAMA JABATAN Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama Penata Kelola Penyehatan Lingkungar Ahli Muda Penata Kelola Penyehatan Lingkungar Ahli Pertama Penata Kelola Bangunan Gedung dar Kawasan Permukiman Ahli Muda Penata Kelola Bangunan Gedung dar Kawasan Permukiman Ahli Pertama Penata Kelola Bangunan Gedung dar Kawasan Permukiman Ahli Pertama Penata Layanan Operasional Pengolah Data dan Informasi	KL B K S 10 2 2 0 8 2 2 0 10 1 2 -1 8 1 4 -3 10 1 3 -2 8 1 4 -3 7 3 3 0 7 0 6 -6 6 1 2 -1	3	NAMA JABATAN KL Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama Penelaah Teknis Kebijakan 7 Pengelola Layanan Operasional 6 Operator Layanan Operasional 5 Penilik Jalan 5 Pengadministrasi Perkantoran 5	1 5 1 1 1	2 1 7 1 3	-1 0 -2 0 -2 0	Kelas 11 NAMA JABATAN Analis Kebijakan Ahli Muda Analis Kebijakan Ahli Pertama Penata Ruang Ahli Muda Penata Ruang Ahli Pertama Penelaah Teknis Kebijakan Pengolah Data dan Informasi Penata Laksana Agraria dan Tata Ruang	KL 10 8 9 8 7 6 6	B 1 0 1 3 5 0 0 0	K 1 1 3 5 5 1 1 1	0 -1 -2 -2 -2 0 -1			
NAMA JABATAN KL B K S	Kelas 11 NAMA JABATAN Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama Penata Kelola Penyehatan Lingkungar Ahli Muda Penata Kelola Penyehatan Lingkungar Ahli Pertama Penata Kelola Bangunan Gedung dar Kawasan Permukiman Ahli Muda Penata Kelola Bangunan Gedung dar Kawasan Permukiman Ahli Muda Penata Kelola Bangunan Gedung dar Kawasan Permukiman Ahli Pertama Penata Kelola Bangunan Gedung dar Kawasan Permukiman Ahli Pertama Penata Layanan Operasional Pengolah Data dan Informasi Pengadministrasi Perkantoran	KL B K S 10 2 2 0 0 8 2 2 0 0 10 1 2 -1 10 1 3 -2 10 1 3 -2 10 1 3 3 0 7 0 6 -6 6 1 2 -1 5 1 1 0 0	3	NAMA JABATAN KL Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama Penelaah Teknis Kebijakan 7 Pengelola Layanan Operasional 6 Operator Layanan Operasional 5 Penilik Jalan 5 Pengadministrasi Perkantoran 5	1 5 1 1 1	2 1 7 1 3	-1 0 -2 0 -2 0	Kelas 11 NAMA JABATAN Analis Kebijakan Ahli Muda Analis Kebijakan Ahli Pertama Penata Ruang Ahli Muda Penata Ruang Ahli Pertama Penelaah Teknis Kebijakan Pengolah Data dan Informasi Penata Laksana Agraria dan Tata Ruang	KL 10 8 9 8 7 6 6	B 1 0 1 3 5 0 0 0	K 1 1 3 5 5 1 1 1	0 -1 -2 -2 -2 0 -1			
NAMA JABATAN KL B K S	Kelas 11 NAMA JABATAN Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama Penata Kelola Penyehatan Lingkungar Ahli Muda Penata Kelola Penyehatan Lingkungar Ahli Pertama Penata Kelola Bangunan Gedung dar Kawasan Permukiman Ahli Muda Penata Kelola Bangunan Gedung dar Kawasan Permukiman Ahli Pertama Penata Kelola Bangunan Gedung dar Kawasan Permukiman Ahli Pertama Penata Layanan Operasional Pengolah Data dan Informasi Pengadministrasi Perkantoran Operator Layanan Operasional	KL B K S 10 2 2 0 8 2 2 0 10 1 2 -1 8 1 4 -3 10 1 3 -2 8 1 4 -3 7 3 3 0 7 0 6 -6 6 1 2 -1 5 1 1 0	3	NAMA JABATAN KL Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama Penelaah Teknis Kebijakan 7 Pengelola Layanan Operasional 6 Operator Layanan Operasional 5 Penilik Jalan 5 Pengadministrasi Perkantoran 5	1 5 1 1 1	2 1 7 1 3 1 1 1	-1 0 -2 0 -2 0	Kelas 11 NAMA JABATAN Analis Kebijakan Ahli Muda Analis Kebijakan Ahli Pertama Penata Ruang Ahli Muda Penata Ruang Ahli Pertama Penelaah Teknis Kebijakan Pengolah Data dan Informasi Penata Laksana Agraria dan Tata Ruang	KL 10 8 9 8 7 6 6	B 1 0 1 3 5 0 0 0	K 1 1 3 5 5 1 1 1	0 -1 -2 -2 -2 0 -1			
NAMA JABATAN KL B K S	NAMA JABATAN Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama Penata Kelola Penyehatan Lingkungar Ahli Muda Penata Kelola Penyehatan Lingkungar Ahli Pertama Penata Kelola Bangunan Gedung dar Kawasan Permukiman Ahli Muda Penata Kelola Bangunan Gedung dar Kawasan Permukiman Ahli Pertama Penata Kelola Bangunan Gedung dar Kawasan Permukiman Ahli Pertama Penata Layanan Operasional Pengolah Data dan Informasi Pengadministrasi Perkantoran Operator Layanan Operasional	KL B K S 10 2 2 0 8 2 2 0 10 1 2 -1 8 1 4 -3 10 1 3 -2 8 1 4 -3 7 3 3 0 7 0 6 -6 6 1 2 -1 5 1 1 0 5 1 1 0 3 3 4 -1	3	NAMA JABATAN KL Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama Penelaah Teknis Kebijakan 7 Pengelola Layanan Operasional 6 Operator Layanan Operasional 5 Penilik Jalan 5 Pengadministrasi Perkantoran 5	1 5 1 1 1	2 1 7 1 3 1 1 1	-1 0 -2 0 -2 0	Kelas 11 NAMA JABATAN Analis Kebijakan Ahli Muda Analis Kebijakan Ahli Pertama Penata Ruang Ahli Muda Penata Ruang Ahli Pertama Penelaah Teknis Kebijakan Pengolah Data dan Informasi Penata Laksana Agraria dan Tata Ruang	KL 10 8 9 8 7 6 6	B 1 0 1 3 5 0 0 0	K 1 1 3 5 5 1 1 1	0 -1 -2 -2 -2 0 -1			
NAMA JABATAN KL B K S	NAMA JABATAN Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama Penata Kelola Penyehatan Lingkungar Ahli Muda Penata Kelola Penyehatan Lingkungar Ahli Pertama Penata Kelola Bangunan Gedung dar Kawasan Permukiman Ahli Muda Penata Kelola Bangunan Gedung dar Kawasan Permukiman Ahli Pertama Penata Kelola Bangunan Gedung dar Kawasan Permukiman Ahli Pertama Penata Layanan Operasional Pengolah Data dan Informasi Pengadministrasi Perkantoran Operator Layanan Operasional	KL B K S 10 2 2 0 8 2 2 0 10 1 2 -1 8 1 4 -3 10 1 3 -2 8 1 4 -3 7 3 3 0 7 0 6 -6 6 1 2 -1 5 1 1 0 5 1 1 0 3 3 4 -1	3	NAMA JABATAN KL Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama Penelaah Teknis Kebijakan 7 Pengelola Layanan Operasional 6 Operator Layanan Operasional 5 Penilik Jalan 5 Pengadministrasi Perkantoran 5	1 5 1 1 1	2 1 7 1 3 1 1 1	-1 0 -2 0 -2 0	Kelas 11 NAMA JABATAN Analis Kebijakan Ahli Muda Analis Kebijakan Ahli Pertama Penata Ruang Ahli Muda Penata Ruang Ahli Pertama Penelaah Teknis Kebijakan Pengolah Data dan Informasi Penata Laksana Agraria dan Tata Ruang	KL 10 8 9 8 7 6 6	B 1 0 1 3 5 0 0 0	K 1 1 3 5 5 1 1 1	0 -1 -2 -2 -2 0 -1			
NAMA JABATAN KL B K S	NAMA JABATAN Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama Penata Kelola Penyehatan Lingkungar Ahli Muda Penata Kelola Penyehatan Lingkungar Ahli Pertama Penata Kelola Bangunan Gedung dar Kawasan Permukiman Ahli Muda Penata Kelola Bangunan Gedung dar Kawasan Permukiman Ahli Pertama Penata Kelola Bangunan Gedung dar Kawasan Permukiman Ahli Pertama Penata Layanan Operasional Pengolah Data dan Informasi Pengadministrasi Perkantoran Operator Layanan Operasional	KL B K S 10 2 2 0 8 2 2 0 10 1 2 -1 8 1 4 -3 10 1 3 -2 8 1 4 -3 7 3 3 0 7 0 6 -6 6 1 2 -1 5 1 1 0 5 1 1 0 3 3 4 -1	3	NAMA JABATAN KL Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama Penelaah Teknis Kebijakan 7 Pengelola Layanan Operasional 6 Operator Layanan Operasional 5 Penilik Jalan 5 Pengadministrasi Perkantoran 5	1 5 1 1 1	2 1 7 1 3 1 1 1	-1 0 -2 0 -2 0	Kelas 11 NAMA JABATAN Analis Kebijakan Ahli Muda Analis Kebijakan Ahli Pertama Penata Ruang Ahli Muda Penata Ruang Ahli Pertama Penelaah Teknis Kebijakan Pengolah Data dan Informasi Penata Laksana Agraria dan Tata Ruang	KL 10 8 9 8 7 6 6	B 1 0 1 3 5 0 0 0	K 1 1 3 5 5 1 1 1	0 -1 -2 -2 -2 0 -1			
NAMA JABATAN KL B K S	NAMA JABATAN Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama Penata Kelola Penyehatan Lingkungar Ahli Muda Penata Kelola Penyehatan Lingkungar Ahli Pertama Penata Kelola Bangunan Gedung dar Kawasan Permukiman Ahli Muda Penata Kelola Bangunan Gedung dar Kawasan Permukiman Ahli Pertama Penata Kelola Bangunan Gedung dar Kawasan Permukiman Ahli Pertama Penata Layanan Operasional Pengolah Data dan Informasi Pengadministrasi Perkantoran Operator Layanan Operasional	KL B K S 10 2 2 0 8 2 2 0 10 1 2 -1 8 1 4 -3 10 1 3 -2 8 1 4 -3 7 3 3 0 7 0 6 -6 6 1 2 -1 5 1 1 0 5 1 1 0 3 3 4 -1	3	Kelas 11 NAMA JABATAN KL Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama Penelaah Teknis Kebijakan Pengelola Layanan Operasional Operator Layanan Operasional 5 Penilik Jalan 5 Pengadministrasi Perkantoran 5 Operator Alat Berat 5	1 5 1 1 1	2 1 7 1 3 1 1 1	-1 0 -2 0 -2 0	Kelas 11 NAMA JABATAN Analis Kebijakan Ahli Muda Analis Kebijakan Ahli Pertama Penata Ruang Ahli Muda Penata Ruang Ahli Pertama Penelaah Teknis Kebijakan Pengolah Data dan Informasi Penata Laksana Agraria dan Tata Ruang	KL 10 8 9 8 7 6 6	B 1 0 1 3 5 0 0 0	K 1 1 3 5 5 1 1 1	0 -1 -2 -2 -2 0 -1			
NAMA JABATAN KL B K S	NAMA JABATAN Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama Penata Kelola Penyehatan Lingkungar Ahli Muda Penata Kelola Penyehatan Lingkungar Ahli Pertama Penata Kelola Bangunan Gedung dar Kawasan Permukiman Ahli Muda Penata Kelola Bangunan Gedung dar Kawasan Permukiman Ahli Pertama Penata Kelola Bangunan Gedung dar Kawasan Permukiman Ahli Pertama Penata Layanan Operasional Pengolah Data dan Informasi Pengadministrasi Perkantoran Operator Layanan Operasional	KL B K S 10 2 2 0 8 2 2 0 10 1 2 -1 8 1 4 -3 10 1 3 -2 8 1 4 -3 7 3 3 0 7 0 6 -6 6 1 2 -1 5 1 1 0 5 1 1 0 3 3 4 -1	3	NAMA JABATAN KL Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama Penelaah Teknis Kebijakan 7 Pengelola Layanan Operasional 6 Operator Layanan Operasional 5 Penilik Jalan 5 Pengadministrasi Perkantoran 5	1 5 1 1 1	2 1 7 1 3 1 1 1	-1 0 -2 0 -2 0	Kelas 11 NAMA JABATAN Analis Kebijakan Ahli Muda Analis Kebijakan Ahli Pertama Penata Ruang Ahli Muda Penata Ruang Ahli Pertama Penelaah Teknis Kebijakan Pengolah Data dan Informasi Penata Laksana Agraria dan Tata Ruang	KL 10 8 9 8 7 6 6	B 1 0 1 3 5 0 0 0	K 1 1 3 5 5 1 1 1	0 -1 -2 -2 -2 0 -1			

1. UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah I
Kelas 9

Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD						
Kelas 8						
NAMA JABATAN	KL	В	K	S		
Operator Layanan Operasional	5	22	55	-33		
Pengadministrasi Perkantoran	5	2	2	0		
Operator Layanan Operasional	1	1	1	0		
Pengelola Umum Operasional	1	0	1	-1		

Keterangan:

KL : Kelas Jabatan

B : Jumlah Pegawai yang tersedia

K : Kebutuhan Pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja

2. UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah II

Kelas 9

Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD							
Kelas 8							
NAMA JABATAN	KL	В	K	S			
Operator Layanan Operasional	5	19	75	-56			
Pengadministrasi Perkantoran	5	2	3	-1			
Operator Layanan Operasional	1	0	2	-2			

Keterangan:

KL : Kelas Jabatan

B : Jumlah Pegawai yang tersedia

K : Kebutuhan Pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja

3. UPTD PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH III DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah III					
Kelas 9					

Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD							
Kelas 8							
NAMA JABATAN	KL	В	K	S			
Operator Layanan Operasional	5	12	73	-61			
Pengadministrasi Perkantoran	5	2	2	0			
Operator Layanan Operasional	1	1	2	-1			

Keterangan:

KL : Kelas Jabatan

B : Jumlah Pegawai yang tersedia

K : Kebutuhan Pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja

4. UPTD PEMELIHARAAN IRIGASI PADUREKSO DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kepala UPTD Pemeliharaan Irigasi Padurekso						
Kelas	8					
NAMA JABATAN	KL	В	K	S		
Pengelola Sumber Daya Air	6	0	1	-1		
Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	6	5	5	0		
Petugas Operasi dan Pemeliharaan	5	10	23	-13		
Pengadministrasi Perkantoran	5	1	1	0		
Operator Layanan Operasional	1	0	1	-1		

Keterangan:

KL : Kelas Jabatan

B : Jumlah Pegawai yang tersedia

K : Kebutuhan Pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja

5. UPTD PEMELIHARAAN IRIGASI BRONDONG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kepala UPTD Pemeliharaan Irigasi Brondong						
Kelas	8					
NAMA JABATAN	KL	В	K	S		
Pengelola Sumber Daya Air	6	1	1	0		
Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	6	5	5	0		
Petugas Operasi dan Pemeliharaan	5	12	43	-31		
Pengadministrasi Perkantoran	5	1	1	0		
Operator Layanan Operasional	1	1	1	0		

Keterangan:

KL : Kelas Jabatan

B : Jumlah Pegawai yang tersedia

K : Kebutuhan Pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja

6. UPTD PEMELIHARAAN IRIGASI PESANTREN KLETAK DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kepala UPTD Pemeliharaan Irigasi Pesantren Kletak							
Kelas	8						
NAMA JABATAN	KL	В	K	S			
Pengelola Sumber Daya Air	6	1	1	0			
Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air	6	5	5	0			
Petugas Operasi dan Pemeliharaan	5	9	24	-15			
Pengadministrasi Perkantoran	5	1	1	0			
Operator Layanan Operasional	1	0	1	-1			

Keterangan:

KL : Kelas Jabatan

B : Jumlah Pegawai yang tersedia

K : Kebutuhan Pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja

7. UPTD LABORATORIUM DAN BENGKEL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kepala UPTD Labo	elas 9

Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD							
Kelas 8							
NAMA JABATAN	KL	В	K	S			
Penata Layanan Operasional	7	3	3	0			
Penelaah Teknis Kebijakan	7	1	1	0			
Operator Layanan Operasional	5	0	3	-3			
Pengadministrasi Perkantoran	5	1	1	0			
Pengelola Umum Operasional	1	0	1	-1			

Keterangan:

KL: Kelas Jabatan

B : Jumlah Pegawai yang tersedia

K : Kebutuhan Pegawai berdasarkan Analisis Beban Kerja

S: Selisih

BUPATI PEKALONGAN, TTD FADIA ARAFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

ADITOMO HERLAMBANG, S.H. Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19680517 198903 1 009